

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Rangkuman Pemikiran

Penelitian ini mengangkat relevansi konsep pendidikan liberatif dari Paulo Freire dengan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia. Paulo Freire mengajukan suatu pendekatan pendidikan yang membebaskan (liberatif), yang berakar pada dialog, kesadaran kritis (*conscientização*), dan penghormatan terhadap kemanusiaan sebagai subjek aktif perubahan sosial. Kurikulum Merdeka Belajar, yang merupakan reformasi kebijakan pendidikan Indonesia, mengusung semangat kemandirian belajar, pembelajaran kontekstual, dan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pendidikan. Penulis menemukan adanya keselarasan antara nilai-nilai inti kedua pendekatan ini, khususnya dalam dimensi filosofis, metodologis, dan tujuan pendidikan.

5.2 Tinjauan Kritis

Namun, dalam mendekati tema ini, ditemukan sejumlah tantangan. Pertama, pendekatan Freire menuntut transformasi radikal dalam relasi guru-murid, yang dalam kenyataannya masih sangat kental dengan pola relasi hirarkis di banyak institusi pendidikan Indonesia. Kedua, pendekatan berbasis dialog dan penyadaran kritis sulit diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan yang masih sangat terstruktur, berbasis asesmen kuantitatif, dan belum sepenuhnya mendukung kebebasan pedagogis. Ketiga, daya dukung seperti pelatihan guru, kesiapan infrastruktur, serta pola pikir masyarakat masih menjadi hambatan serius bagi tercapainya tujuan pendidikan yang liberatif dan emansipatoris sebagaimana dimaksud Freire.

5.3 Kesimpulan

Konsep pendidikan liberatif yang dikembangkan oleh Paulo Freire telah memberikan pengaruh yang revolusioner terhadap pemikiran dan praktik pendidikan di seluruh dunia. Pemikiran Freire yang berangkat dari pengalaman konkretnya mendampingi kaum tertindas di Brasil menawarkan paradigma pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan. Melalui kritiknya terhadap "pendidikan gaya bank" (banking education) yang mendominasi praktik pendidikan konvensional, Freire mengajukan alternatif berupa pendidikan hadap-masalah (problem-posing education) yang dialogis, kritis, dan transformatif. Pendidikan liberatif Freire

pada dasarnya adalah upaya untuk mengembalikan harkat dan martabat manusia yang telah tercerabut akibat sistem pendidikan yang menindas dan relasi kuasa yang tidak setara dalam masyarakat.

Inti dari pemikiran Freire adalah konsep penyadaran (*conscientização*), yakni proses di mana manusia belajar untuk memahami dan mengidentifikasi kontradiksi sosial, politik, dan ekonomi, kemudian mengambil tindakan untuk melawan unsur-unsur yang menindas dalam realitas tersebut. Penyadaran ini dicapai melalui praxis—refleksi dan tindakan—yang memungkinkan individu tidak hanya memahami dunia, tetapi juga mengubahnya. Dalam perspektif Freire, pendidikan sejati harus mengakui kemanusiaan peserta didik sebagai subjek yang memiliki kesadaran dan kapasitas untuk bertransformasi, bukan sebagai objek pasif yang menerima pengetahuan secara mekanis.

Kurikulum Merdeka Belajar yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia hadir sebagai upaya untuk merespons kebutuhan akan perubahan paradigma pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini muncul dari kesadaran bahwa sistem pendidikan yang terlalu kaku, terpusat, dan berorientasi pada konten tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum Merdeka Belajar menawarkan fleksibilitas, keberagaman, dan otonomi bagi satuan pendidikan, guru, dan peserta didik untuk mengembangkan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual.

Terdapat kesesuaian yang mendalam antara konsep pendidikan liberatif Paulo Freire dengan semangat dan orientasi Kurikulum Merdeka Belajar. Pertama, keduanya memiliki komitmen yang sama terhadap prinsip pembebasan. Jika Freire mendefinisikan pendidikan sebagai praktik pembebasan dari struktur yang menindas, Kurikulum Merdeka Belajar menekankan pada pembebasan dari praktik pendidikan yang kaku, seragam, dan tidak berpihak pada perkembangan optimal peserta didik. Kebijakan penyederhanaan RPP, penghapusan

USBN, perubahan sistem SNMPTN, dan pelaksanaan AKM sebagai pengganti Ujian Nasional mencerminkan upaya untuk membebaskan guru dan peserta didik dari beban administratif dan tekanan pengajaran yang berorientasi pada ujian semata.

Kedua, konsep dialog yang menjadi pilar utama dalam pedagogik Freire mendapatkan ruang yang luas dalam Kurikulum Merdeka Belajar. Dialog dalam perspektif Freire bukanlah sekadar percakapan, melainkan proses di mana guru dan peserta didik bersama-sama mengkonstruksi pengetahuan dalam relasi yang setara dan saling menghormati. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*) yang ditekankan dalam Kurikulum Merdeka Belajar sejalan dengan prinsip ini. Melalui berbagai pendekatan seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan metode inkuiri, peserta didik didorong untuk aktif membangun pengetahuan mereka sendiri dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

Ketiga, baik Freire maupun Kurikulum Merdeka Belajar menekankan pentingnya kontekstualisasi pendidikan. Freire berpendapat bahwa materi pembelajaran harus berangkat dari "tema-tema generatif" (*generative themes*) yang berasal dari pengalaman hidup peserta didik. Sejalan dengan itu, Kurikulum Merdeka Belajar mendorong pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum memungkinkan satuan pendidikan untuk mengakomodasi keberagaman konteks sosial, budaya, dan ekonomi di Indonesia, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan.

Keempat, transformasi peran guru menjadi titik temu lainnya antara pemikiran Freire dan Kurikulum Merdeka Belajar. Freire mengkritik model pendidikan tradisional di mana guru berperan sebagai "depositor" pengetahuan dan peserta didik sebagai "wadah kosong" yang pasif. Sebagai gantinya, ia mengusulkan model di mana guru dan peserta didik adalah co-

learners yang bersama-sama terlibat dalam proses penemuan dan konstruksi pengetahuan. Kurikulum Merdeka Belajar meredefinisi peran guru dari "pengajar" menjadi "fasilitator" dan "pemimpin pembelajaran" yang mendampingi peserta didik dalam mengembangkan potensi mereka secara optimal.

Kelima, orientasi pada pembentukan karakter dan pengembangan kesadaran kritis merupakan aspek yang ditekankan baik oleh Freire maupun Kurikulum Merdeka Belajar. Konsep penyadaran kritis (critical consciousness) Freire bertujuan untuk membentuk individu yang mampu menganalisis secara kritis struktur kekuasaan dan mengambil tindakan untuk mengubah realitas yang menindas. Profil Pelajar Pancasila yang menjadi landasan filosofis Kurikulum Merdeka Belajar mencakup dimensi-dimensi seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dimensi-dimensi ini mencerminkan upaya untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran kritis dan karakter yang kuat.

Keenam, baik Freire maupun Kurikulum Merdeka Belajar memiliki visi tentang transformasi sosial melalui pendidikan. Bagi Freire, pendidikan sejati harus mengarah pada praxis—refleksi dan tindakan untuk mengubah dunia. Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial-politik dan harus berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Kurikulum Merdeka Belajar, dengan penekanannya pada pengembangan kompetensi abad 21 dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global, juga memiliki orientasi transformatif. Melalui pendekatan pembelajaran yang memberdayakan, kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi yang mampu berkontribusi positif dalam pembangunan berkelanjutan dan menciptakan perubahan sosial yang konstruktif.

Meskipun terdapat keselarasan yang kuat antara pemikiran Freire dan Kurikulum Merdeka Belajar, implementasi konsep pendidikan liberatif dalam konteks Indonesia tidak

terlepas dari tantangan. Sistem pendidikan Indonesia yang masih dipengaruhi oleh warisan kolonial dan struktur birokrasi yang hierarkis seringkali menghambat transformasi radikal yang diidealkan oleh Freire. Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan kompetensi guru, dan kultur pendidikan yang masih berorientasi pada hasil ujian merupakan hambatan nyata yang perlu diatasi.

Relevansi pemikiran Freire dengan Kurikulum Merdeka Belajar memberikan landasan filosofis dan pedagogis yang kuat untuk mengembangkan praktik pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan di Indonesia. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pendidikan liberatif ke dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, Indonesia berpotensi untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademis, tetapi juga kritis, reflektif, dan mampu menjadi agen perubahan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Tantangan bagi para pemangku kepentingan pendidikan adalah bagaimana menerjemahkan visi transformatif ini ke dalam praktik kongkret di berbagai konteks pendidikan di Indonesia, dengan tetap menghormati keberagaman budaya, sosial, dan ekonomi yang ada.

5.4 Saran

Berdasarkan kajian tentang konsep pendidikan liberatif Paulo Freire dan relevansinya dengan Kurikulum Merdeka Belajar, terdapat beberapa saran penting yang perlu dipertimbangkan untuk mengoptimalkan implementasi kurikulum ini dalam konteks pendidikan Indonesia. Saran-saran ini bertujuan untuk memastikan bahwa semangat pembebasan dan humanisasi yang menjadi inti pemikiran Freire dapat terinternalisasi dengan baik dalam praktik pendidikan di Indonesia melalui Kurikulum Merdeka Belajar.

Pertama, perlu dilakukan penguatan literasi kritis di kalangan pendidik Indonesia sebagai prasyarat implementasi pendidikan yang membebaskan. Guru sebagai fasilitator utama proses pembelajaran harus terlebih dahulu mengalami proses penyadaran kritis

(conscientização) untuk dapat memfasilitasi proses serupa pada peserta didik. Program pelatihan dan pengembangan profesional guru perlu didesain ulang dengan mengintegrasikan aspek pedagogik kritis Freire. Pelatihan semacam ini tidak cukup hanya berfokus pada aspek teknis pengajaran, tetapi harus mencakup dimensi filosofis, sosiologis, dan politik pendidikan yang memungkinkan guru memahami peran mereka sebagai agen perubahan. Guru perlu dibekali dengan kemampuan untuk menganalisis struktur kekuasaan dalam pendidikan, mengidentifikasi praktik-praktik yang menindas, dan mengembangkan strategi untuk menciptakan pembelajaran yang membebaskan.

Kedua, dibutuhkan transformasi struktur dan kultur sekolah menjadi komunitas dialogis yang demokratis. Implementasi pendidikan liberatif Freire membutuhkan lingkungan yang mendukung terciptanya dialog autentik antara semua anggota komunitas sekolah. Struktur hierarkis yang kaku dalam sistem sekolah Indonesia perlu ditinjau ulang dan direkonstruksi untuk memberikan ruang bagi partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Praktik-praktik seperti rapat terbuka, forum diskusi guru-siswa, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kurikulum perlu diperkuat. Kultur kompetitif yang sering mendominasi lingkungan sekolah juga perlu digeser menuju kultur kolaboratif yang menekankan pada pembelajaran bersama dan kesetaraan.

Ketiga, pengembangan kurikulum kontekstual yang berangkat dari realitas dan pengalaman hidup peserta didik perlu menjadi prioritas. Freire menekankan bahwa materi pembelajaran harus berangkat dari "tema-tema generatif" yang berasal dari kehidupan nyata peserta didik. Dalam konteks Indonesia yang sangat beragam, pendekatan ini mengharuskan adanya desentralisasi dan kontekstualisasi kurikulum yang lebih mendalam. Meskipun Kurikulum Merdeka Belajar telah memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai konteks lokal, masih diperlukan pendampingan yang intensif bagi sekolah dan guru untuk dapat mengidentifikasi tema-tema generatif yang relevan

dengan realitas sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik di daerah masing-masing. Pengembangan bank tema-tema generatif yang bersifat regional dapat menjadi salah satu solusi untuk mempermudah proses ini.

Keempat, sistem evaluasi dan penilaian dalam Kurikulum Merdeka Belajar perlu direorientasi agar sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan liberatif. Sistem penilaian yang masih didominasi oleh tes terstandarisasi dan berorientasi pada hasil perlu digeser menuju penilaian autentik yang berfokus pada proses dan konteks. Penilaian harus mampu menangkap tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga dimensi afektif dan aksi sosial yang menjadi bagian integral dari proses penyadaran kritis ala Freire. Portofolio, proyek komunitas, penelitian tindakan partisipatif, dan refleksi kritis dapat menjadi alternatif bentuk penilaian yang lebih sesuai dengan semangat pendidikan liberatif.

Kelima, perlu dikembangkan kolaborasi yang lebih erat antara sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung implementasi pendidikan liberatif. Perguruan tinggi, khususnya fakultas keguruan, dapat berperan sebagai pusat pengembangan pedagogik kritis dan pendampingan sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar dengan pendekatan Freire. Penelitian kolaboratif antara akademisi, praktisi pendidikan, dan komunitas perlu didorong untuk menghasilkan pengetahuan baru tentang adaptasi dan kontekstualisasi pemikiran Freire dalam realitas pendidikan Indonesia.

Keenam, diperlukan upaya sistematis untuk mendemokratisasi akses terhadap sumber daya dan teknologi pendidikan. Freire menekankan bahwa pendidikan liberatif harus bersifat inklusif dan berpihak pada kelompok marginal. Dalam era digital saat ini, kesenjangan akses terhadap teknologi (digital divide) berpotensi menciptakan bentuk ketidakadilan baru dalam pendidikan. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar harus disertai dengan kebijakan

afirmatif untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di daerah terpencil dan komunitas marginal memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, infrastruktur, dan teknologi pendidikan.

Ketujuh, dan mungkin yang paling fundamental, diperlukan refleksi kritis terhadap relasi kekuasaan dalam sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan liberatif Freire pada dasarnya adalah upaya politis untuk mengubah relasi kekuasaan yang tidak adil. Kurikulum Merdeka Belajar perlu dilihat tidak sekadar sebagai reformasi teknis, tetapi sebagai bagian dari proyek politik yang lebih luas untuk mendemokratisasi pendidikan dan masyarakat Indonesia. Ini mengharuskan adanya dialog kritis antara berbagai pemangku kepentingan tentang tujuan pendidikan, distribusi kekuasaan dalam sistem pendidikan, dan peran pendidikan dalam transformasi sosial. Tanpa refleksi semacam ini, ada risiko bahwa Kurikulum Merdeka Belajar hanya akan menjadi reformasi superfisial yang gagal menyentuh struktur kekuasaan yang mendasari sistem pendidikan.